

JAJAHAN NEGARA PERANCIS, MAROKO, PERJANJIAN FEZ 1912, PERISTIWA BAR BAR TAHUN 1950, KEMERDEKAAN MAROKO

A. Latar Belakang

Maroko merupakan negara dengan monarki konstitusional dan parlemen yang dipimpin oleh seorang raja. Dengan letak geografis yang strategis dan menjadi pintu gerbang antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, Maroko memiliki perpaduan budaya yang sangat kaya. Selain itu, terdapat banyak sumber daya alam. Maroko memiliki fosfor di wilayahnya dan merupakan produsen fosfor ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Penghuni Maroko pertama yang diketahui adalah suku Amazigh dan kelompok suku lainnya. Struktur hukum mereka ditentukan oleh sistem informal berdasarkan hukum adat Islam dan non Islam. Awalnya, sebagian besar masyarakat Amazigh menganut agama Kristen, namun melalui pertemuan Arab yang dimulai pada abad ke-7, banyak dari mereka yang masuk Islam, sehingga sistem hukum informal mereka sebagian besar bersumber dari ajaran Islam. Budaya Amazigh berbeda dengan budaya Maroko lainnya terutama dalam hal bahasa, itulah sebabnya banyak anak putus sekolah karena diajar dalam “bahasa asing”, yaitu bahasa Arab. Sekitar dua pertiga penduduk Amazigh Maroko tinggal di daerah pedesaan, dimana budaya mereka sangat mengakar. Sistem politik Amazigh berpusat pada suku dan keluarga. Setiap suku mempunyai kepala suku, dan masyarakat sering kali mempunyai Sharif, sebuah keluarga yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang kemudian diberikan penghormatan dengan penuh rasa hormat.

Pada awal tahun 1900-an, Maroko terbagi antara pemerintahan Spanyol dan Perancis, dengan wilayah tengah sebagian besar berada di bawah kendali Perancis, sedangkan wilayah utara dan selatan lebih banyak dipengaruhi Spanyol. Inggris Raya mengakui wilayah pengaruh Prancis dan pada tahun 1912 Maroko dinyatakan sebagai protektorat Prancis. Oleh karena itu, wilayah ini secara hukum dikuasai dan dilindungi oleh Prancis hingga merdeka dari Prancis pada tahun 1956; Penjajah Spanyol lainnya mundur pada waktu yang hampir bersamaan dengan penjajah Prancis (Leila Hanafi, 2020).

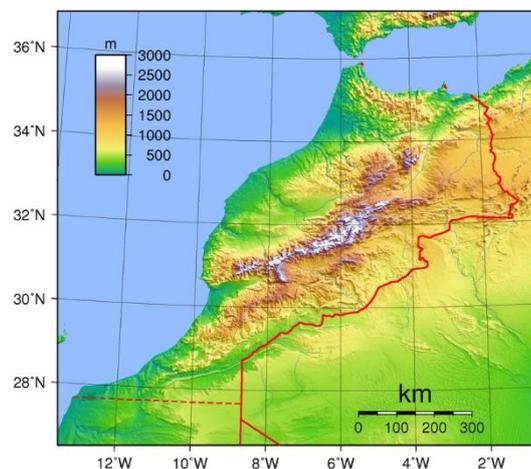
Maroko adalah negara mayoritas Muslim. Menurut tahun 1900, populasi negara Maroko awalnya enam juta jiwa. Pertumbuhan penduduk cukup pesat, terutama pada tahun 1950-an

dan 1960-an yang tumbuh sekitar 3%.1981. 20 juta orang tinggal di Maroko menurut data resmi.Jumlah tersebut meningkat menjadi 29,6 juta pada tahun 2004, dan pada tahun 2014,Pusat Statistik Maroko mempublikasikan populasinya sebesar 33,8 juta (Bernard Botiveau, 1993).

Sistem pemerintahan Maroko mengikuti model kerajaan (Kingdom of Morocco) berdasarkan konstitusi (monarki konstitusional). merupakan negara berkembang yang pernah dijajah oleh Perancis. Pada tanggal 2 Maret 1956, Sultan dan pemerintah Perancis mendeklarasikan kemerdekaan Maroko (Deklarasi Persatuan Perancis-Maroko). Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko (Maksum, M. , 2016).

B. Maroko Sebagai Negara Jajahan Perancis

1. Kondisi Geografis Maroko



Gambar 1. Peta Geografis Maroko

Sumber: wikipedia.com

Sultan Hasan II menyatakan bahwa Maroko dapat disamakan dengan sebatang pohon yang memiliki akar yang meluas ke seluruh benua Afrika. Tetapi, menghirup udara di benua Eropa. Tentu saja, Maroko adalah Negara paling barat di antara negara-negara Maghrib lainnya, seperti Algeria dan Tunisia. Rabat merupakan ibu kota kerajaan Maroko, sementara Casablanca menjadi kota terbesar dan paling terkenal di negara tersebut.

Negara Maroko terletak di pertemuan antara benua Eropa, Afrika, dan Asia. Maroko memiliki empat pusat utama: Rabat sebagai ibu kota pemerintahan, Casablanca sebagai pusat bisnis dan industri, Marrakech sebagai destinasi wisata, dan Fes sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Maroko terdiri dari lima wilayah yang berbeda, yaitu

pegunungan, area subur di bagian barat, daerah berlumpur di barat daya, tanah pertanian di tengah wilayah, dan gurun yang berdekatan dengan Gurun Sahara.

Area pegunungan dibagi menjadi tiga wilayah: Middle Atlas, High Atlas, dan Anti Atlas Ranges (Njoke, 2006). Di sebelah selatan Rif dan lembah sungai Sebu terletak wilayah Middle Atlas, yang terpisah dari tepi timur High Atlas yang meluas hingga ke lembah sungai Abid. High Atlas membentang sejauh 450 mil dan mencakup area seluas 40 mil persegi. Karena itu, wilayah High Atlas terbagi menjadi dua zona iklim yang berbeda; satu zona dipengaruhi oleh angin laut Mediterania, sementara zona lainnya dipengaruhi oleh kondisi dari gurun Sahara.

Di selatan Anti-Atlas, terdapat koneksi dengan High Atlas melalui gunung vulkanik Siruoa. Di wilayah yang jauh ke selatan Anti-Atlas, terdapat oase, sungai yang hanya terjadi pada musim tertentu, dan kota-kota kecil yang terisolasi. Terdapat dua pegunungan yang memiliki pengaruh terhadap pembagian kawasan Maroko, yaitu pegunungan Atlas dan pegunungan Rif. Maroko memiliki empat musim yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur.

2. Populasi Penduduk Maroko

Seperti halnya di masyarakat Arab atau Afrika, Maroko juga terdiri dari banyak sekali komunitas bahasa. Pada waktu yang lampau, setiap komunitas bahasa memiliki kehidupan sendiri dan beroperasi secara mandiri. Suku Berber merupakan kelompok etnis asli Maroko. Dia sudah menetap di daerah Maroko dan sekitarnya berabad-abad sebelum bangsa lain menguasainya. Tiga suku yang membentuk Suku Berber adalah Amazigh, Syilha, dan Rifi. Ketiga kelompok masyarakat ini memiliki ragam bahasa dan dialek yang berbeda-beda.

Fenomena ini meredup karena adanya perkawinan antara suku dan pengaruh kuat bangsa Arab dalam hal bahasa maupun identitas. Hingga akhirnya, terjadi perkawinan antara bangsa Arab dan Berber yang menghasilkan generasi baru. Mayoritas penduduk Maroko adalah Arab-Berber Maroko, yang mencapai 99,1% dari total penduduk. Penduduk Yahudi hanya 0,2%, sedangkan minoritas lainnya, termasuk Moor, Arab, Negro, dan Eropa, mencapai 0,7% (Ibid, hal. 26).

Sebanyak 32.209.101 juta jiwa penduduk Maroko, sekitar sepertiga dari total penduduknya, tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, sekitar tiga dari setiap sepertiga yang

tinggal di kota tersebut, tinggal di Casablanca. Sebagian besar penduduk lokal Berber tinggal di daerah pegunungan. Nama Berber sendiri berasal dari istilah Romawi "Barbarus" yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tinggal di wilayah Maroko. Saat ini, mayoritas penduduk Maroko adalah keturunan yang berasal dari perpaduan etnis Arab, Berber, dan Afrika. Masyarakat Maroko yang berdarah Arab dan Berber memiliki beberapa keunikan dan ciri khas yang membedakan mereka dari yang lain: mereka memiliki mata berwarna biru yang bervariasi dengan jenis kulit karena adanya percampuran suku, serta memiliki tubuh yang tinggi dan kurus.

3. Bahasa

tiga bahasa yang menjadi mayoritas di wilayah ini, yakni Arab, Berber, dan Prancis. Lebih dari dua pertiga jumlah penduduk secara keseluruhan menggunakan bahasa Arab. Di Maroko terdapat dua variasi bahasa Arab, yaitu bahasa Arab formal dan bahasa Arab Maroko. Dalam surat kabar, korespondensi, pidato, serta proses pembelajaran agama dan filsafat, Bahasa Arab standar atau yang juga dikenal sebagai Bahasa Arab fushah, seringkali digunakan. Penggunaan bahasa Arab Fushah dalam dialog sehari-hari tidak umum. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa Arab Maroko sering digunakan. Bahasa Arab ini telah dipengaruhi oleh dialek orang Berber, Prancis, dan Spanyol. 30% dari penduduk menggunakan Bahasa Berber dengan sementara itu Bahasa Prancis digunakan dalam kepentingan bisnis, pemerintahan, dan hubungan internasional. Pentingnya mempelajari Bahasa Prancis di sekolah ditekankan agar generasi mendatang dapat berinteraksi dengan masyarakat internasional (Ibid, hal. 28).

4. Pemerintahan

Dinasti Alawiyah telah mewarisi takhta kerajaan selama beberapa generasi. Sebagai kepala negara, Raja resmi dilantik mengikuti sistem khalifah dan diangkat menjadi Amirul Mukmin, yang menandakan bahwa Raja juga memimpin umat Islam. Pemerintahan berjalan melalui eksekutif yang terdiri dari kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh kepala negara. Maroko memiliki sistem parlemen dengan dua majelis, yaitu majelis bawah yang dipilih oleh rakyat langsung dan majelis atas yang dipilih secara tidak langsung. Setelah sang ayah meninggal, Raja Muhammad VI mengumumkan bahwa Maroko akan menjadi Negara dengan sistem monarki konstitusional, yang menganut prinsip liberalisme ekonomi dan demokrasi multipartai. Ia berkomitmen untuk

menghilangkan kemiskinan, menciptakan peluang kerja, serta lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat (Njoke, 2006)

Maroko adalah suatu wilayah yang terletak di tanah Maghrib dan merupakan negara yang secara resmi tidak pernah dikuasai oleh bangsa manapun. Tunisia, Aljazair, dan Libya memiliki pengalaman yang berbeda dengan negara-negara tetangganya karena sering kali menghadapi gangguan dan intervensi dari kekuatan asing. Akan tetapi, ketika memasuki awal abad ke-20 M, negara-negara yang dianggap sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara inferior mulai terkena gelombang kolonialisme. Maroko juga mengalami tekanan dari kekuatan imperialisme barat seperti Inggris dan Prancis (Fitria, 2018).

Pada tahun 1912, Abdelhafid menandatangani *Treaty of Fez* yang menjadi awal dari masa Protektorat Prancis di Maroko. Setelah traktat tersebut ditandatangani, keadaan Maroko bertambah buruk, terutama di sektor ekonominya. Keadaan politik saat ini tidak lagi memungkinkan adanya kebebasan berpolitik seperti yang ada sebelumnya. Budaya Prancis mulai diperkenalkan kepada masyarakat Maroko. Sekolah dan media berperan penting di Prancis dalam mengadopsi budaya secara dalam. Sangat memprihatinkan, pemisahan antara orang Arab dan orang Berber telah dilakukan selama mereka hidup bersama sebelum kedatangan Prancis dengan harapan memberikan keistimewaan kepada orang Berber (Rahman, 2015).

C. Perjanjian Fez 1912

Pada tahun 1894-1908, Maroko jatuh ke tangan Abdul Aziz bin Hassan, atas permintaannya Prancis menyusup pada tahun 1901-1904. Penggantinya, Abdul Hafiz, juga meminta bantuan militer, keuangan dan politik dari Prancis sehubungan dengan pemberontakan rakyat Maroko, dan melepaskan kemerdekaan politik mereka. 30 Maret 1912 M Perjanjian Fez antara Prancis dan Maroko menyepakati bahwa Maroko akan menjadi protektorat Prancis, meskipun para elit tradisional sebenarnya menginginkan kemerdekaan berdasarkan nasionalisme Islam.

Partai Front Nasional dibentuk pada tahun 1930 berdasarkan keputusan Berber tanggal 16 Mei 1930 M. di Rabat. Komite Aksi Maroko lahir sebagai partai nasionalis pertama pada Mei 1932, namun dibubarkan oleh Prancis 3 tahun kemudian. Selanjutnya pada tahun 1934 lahirlah partai Istiqlal (Kemerdekaan) yang dipimpin oleh Allal Al-Fazi yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Maroko dalam bentuk pemerintahan konstitusional. Pemimpin Maroko saat itu adalah partai Sultan Muhammad V. Istiqlal yang diubah setelah Perang Dunia

II menjadi Partai Kemerdekaan Demokratik yang berorientasi sayap kiri (komunis), meski dengan sedikit pendukung. Pada akhir tahun 1946, partai Istiqlal berubah haluan menjadi partai massa, namun citranya (Sultani Muhammad V) dibuang. Baru pada tahun 1955 Sultan Muhammad V kembali dari pengasingan, yang secara tiba-tiba mengakhiri rezim protektorat. Pada tanggal 2 Maret 1956, Maroko merdeka dan Barakah menjadi rajanya (Azhar Nur, 2011).

Berdasarkan pemaparan Teguh Santosa, Direktur Pemasaran Media Asing DK-PRIMA dalam wawancara dengan media internet Republik Merdeka, Kerajaan Maroko telah berdiri sejak abad ke-8 dan merupakan salah satu kerajaan tertua di dunia. Penjajah Eropa mulai menyerbu negara-negara Afrika dan akhirnya Maroko jatuh ke tangan Perancis, sedangkan Sahara berada di pihak Spanyol dan wilayah tersebut lebih dikenal dengan nama Sahara Barat. Berasal dari Perjanjian Fez yang ditandatangani pada bulan Maret 1912. Setelah beberapa tahun menduduki wilayah tersebut, setelah Perang Dunia Kedua, Prancis membebaskan Maroko dan Front Polisaria memberikan tekanan kepada Spanyol hingga akhirnya Spanyol menandatangani perjanjian antara Maroko dan Mauritania. kemudian menyerahkan Sahara Barat kepada keduanya. Sedikit demi sedikit, di bawah tekanan berbagai pihak, Mauritania pun mundur dan menyerahkan Sahara Barat (Adnan Adwitama, 2022).

Berdasarkan sejarah panjang Maroko, yaitu sejarah dinasti Islam, kaum nasionalis terus melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan modernisme yang diusung Perancis. Kaum nasionalis percaya bahwa nasionalisme Maroko berkembang jauh sebelum kedatangan Perancis. Identitas Arab-Muslim menjadi pertanyaan penting untuk memperkuat argumen dasar tersebut. Sebab, Dahir Berber menjadi blunder Perancis. Karena Dahir Berbere tidak menguatkan masyarakat Berber, justru menimbulkan perbedaan antara orang Arab dan Berber. Kaum nasionalis menyadari bahwa protektorat hanyalah siasat Perancis untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, yaitu pelaksanaan kebijakan kolonial. Perjanjian Fez yang menjanjikan penghormatan terhadap kedaulatan Maroko, nyatanya secara perlahan mengebiri Perancis (M. Arief Rahman, 2015).

D. Peristiwa Bar-bar

Peristiwa "barbar" yang terjadi di Afrika pada tahun 1950-an meliputi berbagai konflik, pemberontakan, dan pergerakan revolusioner di berbagai negara di benua tersebut. Ini termasuk perjuangan melawan penjajahan Eropa, yang pada saat itu banyak negara Afrika yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Peristiwa tersebut sering kali disebut sebagai "perang-perang kemerdekaan" atau "perang-perang pembebasan," di mana para pejuang kemerdekaan

berusaha mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial bagi negara mereka. Beberapa peristiwa penting termasuk pemberontakan Mau Mau di Kenya, perjuangan di Aljazair untuk meraih kemerdekaan dari Prancis, serta gerakan kemerdekaan di negara-negara seperti Ghana, Nigeria, Kongo, dan banyak lagi. Periode ini menandai awal dari dekolonisasi di Afrika, di mana banyak negara berhasil meraih kemerdekaan mereka dari penjajah Eropa.

Syekh Abu Amran al-Fasi diperintahkan oleh Abdullah bin Yasin untuk menyebarkan agama di kalangan suku Barbar Sanhaja di daerah Sahara, Maroko bagian selatan. Sebagai seorang ulama terkemuka yang bermadzhab Maliki dan berasal dari Maroko Utara, ia mengambil tugas tersebut. Meskipun suku Barbar Sanhaja telah mengenal Islam sejak abad ketiga Hijriah, dakwahnya dianggap terlalu keras bagi masyarakat nomadik Barbar. Akibatnya, ia diusir dari Sahara. Al-Fasi kemudian melanjutkan dakwahnya ke arah selatan, khususnya sekitar sungai Senegal, dimana ia mendirikan sebuah ribath sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama. Kelompok yang mendiami ribath ini kemudian dikenal sebagai Murabithun, juga dikenal sebagai al-mulastimun (bercadar). Mereka berhasil mendapatkan pengikut dan membentuk suatu komunitas keagamaan. Dengan motivasi keagamaan sebagai dasar, mereka kemudian mengorganisir diri untuk melakukan jihad melawan berbagai suku Sanhaja lainnya. Inilah awal mula pergeseran gerakan dakwah agama menjadi gerakan politik. Di bawah pimpinan panglima Abu Bakar bin Umar, kelompok Murabithun melancarkan serangan terhadap suku Barbar lainnya yang dianggap sesat di Sahara dan Maroko (Moh. Nurhakim, 2004).

Perang-perang "barbar" di Afrika pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang disebut sebagai "revolusi Afrika," tidak mencerminkan kemerdekaan sejati, tetapi merupakan peristiwa yang digantikan dengan neokolonialisme oleh kelompok yang melakukan penjarahan. Gelombang kemerdekaan di Afrika pada periode tersebut bukanlah representasi dari kemerdekaan yang sebenarnya, melainkan pergeseran dari kolonialisme menuju neokolonialisme oleh mereka yang terlibat dalam penjarahan. Suku Barbar, dalam konteks perang-perang Bar Bar Afrika 1950, memegang peran kunci sebagai pionir dan penyokong kemerdekaan di Afrika. Mereka adalah kelompok kepemimpinan yang berasal dari wilayah Afrika Utara, yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara Barat. Mereka merupakan dinasti pertama yang berhasil meraih kendali atas wilayah tersebut (Syahraeni, 2013).

Perang Barbar Afrika 1950 berakhir pada tahun 1950 dengan pendudukan militer di Ethiopia dan penambahannya sebagai koloni baru di Afrika. Akar penyebab konflik ini berasal dari kekerasan apartheid di Afrika Selatan, yang mendorong ANC (African National Congress) untuk menyatakan seluruh wilayah Afrika Selatan sebagai zona konflik. Sebelumnya, Afrika Utara dan Maroko secara bertahap melepaskan pengaruh Istanbul, sementara industrialisasi Eropa memperkuat integrasi kawasan Afrika Utara dengan perdagangan Mediterania. Jejak kehadiran orang Phoenician di Maroko menunjukkan peran aktif kawasan ini dalam perdagangan sejak zaman kuno. Pada tahun 670 M, pasukan Umayyah di bawah pimpinan Uqba ibn Nafi menaklukkan Afrika Utara, membawa budaya Arab dan agama Islam ke wilayah tersebut. Setelah kekuasaan dinasti Bani Idrisiah meredup, pengaruh politik Arab menurun di Maroko, memberi kesempatan bagi suku Barber untuk mengambil alih pemerintahan. Puncak keemasan Maroko terjadi di bawah kekuasaan Barber pada abad ke-11 M. Dinasti Almoravids, Almohads, kemudian Marinid dan terakhir Saadi, berusaha memperluas pengaruh Maroko ke Barat laut Afrika. Dampak pengusiran massal kaum Muslim dari Andalusia dan migrasi besar-besaran kaum Muslim ke Afrika Utara menciptakan masalah sosial di wilayah tersebut, mendorong beberapa untuk melakukan jihad melawan pendudukan Spanyol dan Portugis. Pada tahun 1684, Alwai menyerbu Tangier. Hubungan yang baik dengan Amerika Serikat telah terjalin sebelumnya (Sahabat Maroko, 2010).

E. Kemerdekaan Maroko

- **Perjuangan masyarakat Maroko**

Kekalahan Prancis oleh Jerman dalam Perang Dunia II sudah jelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perjuangan masyarakat Maroko. Alasannya adalah hal ini mempengaruhi psikologi masyarakat Maroko, membuat mereka semakin percaya diri, hal ini membuktikan bahwa Prancis tidak seunggul yang diharapkan sampai dikalahkan oleh Jerman pada tahun 1940. Selain itu, hal ini sebenarnya sesuai dengan kasus di Indonesia. Belanda kalah atas Jepang, kekalahan Jepang di tangan sekutu mempengaruhi psikologi para pahlawan dan pendiri bangsa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian peristiwa hal-hal di atas hanya sekedar faktor pendukung namun menjadi kunci utama dalam mencapai kemerdekaan, realisasinya tetap berada di tangan raja. Karena bagaimanapun juga, raja adalah otoritas tertinggi komunitas muslim Maroko. Sultan masih dibutuhkan untuk melangserkan kekuasaan Prancis di Maroko, bagaimanapun juga Sultan Mohammed V adalah tokoh populer di Maroko saat itu. Di sisi lain, kaum nasionalis butuh sosok sultan akan mengisi posisi tersebut ketika Prancis ditaklukkan agar Maroko belum runtuh sebagai sebuah negara. Artinya, kalangan

nasionalis sangat tergantung kepada dukungan sultan agar upaya-upaya yang mereka lancarkan dapat berjalan sesuai rencana.

Pada tahun 1943, para pemimpin nasionalis masih ditahan dan mengasingkan. Hal ini memaksa kaum nasionalis untuk segera mengubah bentuk perjuangannya, awalnya hanya memaksakan perubahan di Perancis, dari beberapa hal terkait hubungan Maroko dan Perancis saat itu beralih ke tuntutan kemerdekaan. Permintaan itu terkandung dalam satu Pernyataan Ahmed Balafrezi, Abdallah Ibrahim dan Mohammed Ryazidi dan Umar Abdeljalil, ini bukan hanya ditujukan kepada gubernur umum, namun diangkat ke forum internasional untuk memungkinkan Perancis untuk mendapat tekanan dunia internasional. (Lahbabi, hal 23)

- **Proses kemerdekaan**

Pada tanggal 11 Januari 1944, Partai Istiklal (Hizb al-Istiqlal) didirikan bersamaan dengan berlakunya proklamasi kemerdekaan. gubernur baru Gabriel Pyuault. Setelah pengiriman selesai, Perancis akan mempertimbangkan reformasi hubungan antara Maroko dan Perancis, namun hal itu tidak berarti mengakui kemerdekaan Maroko. Pada tanggal 13 Januari 1944, di Konferensi Brazzaville, tampaknya Perancis tidak mempertimbangkan tuntutan nasionalis. Tanggal 29 Januari orang-orang Istiklal menjadi tahanan politik. Selain itu, Sultan juga dinyatakan sebagai pembangkang oleh de Gaulle karena simpatinya terhadap gerakan tersebut yang dilakukan oleh kaum nasionalis. Hubungan komunikasi implisit yang dibangun selama ini tampaknya telah diketahui oleh orang Perancis.

Pada tahun 1947, Sultan mulai secara terbuka mendukung perjuangan kalangan nasionalis. Dia menunjukkan ini selama kunjungannya ke Tangier, sebuah lokasi yang dijadikan tempat netral, zona internasional. Meski terang-terangan mendapat dukungan penuh dari Sultan, kalangan nasionalis masih kekurangan dukungan dari wilayah pedesaan. Disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian (Bidwell, hal 185). Pada tahun 1946, Laoux digantikan oleh Eric Labonne. Sebagai sebuah langkah pertama, Labonne memerintahkan pembebasan tahanan yang tersisa. Sejak berdirinya Istiklal, tindakan represif segera diambil. Pada tahun 1944, Raja Mohammed V sangat berhati-hati menjadi pelindung yang memegang kunci akan keberhasilan pergerakan nasionalis untuk kedepannya. Pada tahun 1945, ia disambut oleh antusias pendukung yang menyuarakan kemerdekaan di Marrakesh (Abderrahim Ouardighi, 1976). Namun sebelum itu dapat dilakukan terjadi kerusuhan di Casablanca, bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh militer Perancis, Setidaknya beberapa ratus orang tewas (Leveau, hal 19-25). Setelah tragedi tersebut, Labonne digantikan oleh Jenderal Juin.

Mengganti gubernur Jenderal adalah angin segar bagi kaum nasionalis Maroko. Alasannya, juin ingin mengakui Sultan sebagai pemimpin independen Maroko. pada saat yang sama, sultan dapat terus berbicara kepada publik dengan mewakili bangsa Maroko. Dengan cara ini, sultan lebih leluasa melakukannya untuk memperkuat rakyat Maroko. Selain itu, berita positif lainnya adalah bahwa pada tahun 1947, daerah pedesaan mengalami pemulihan pasca perang dan kekeringan, dan siap mendengarkan pidato-pidato dari sultan (Julien, Le Maroc, & Stephen Bernard, 1968). Kaum nasionalis harus menunjukkan kebencian serupa menentang perlindungan Perancis sebagai dasar penyatuan masyarakat Maroko. Hasilnya jelas, untuk melawan protektorat Perancis, sehingga Maroko bisa menjadi negara merdeka. Dalam perkembangan selanjutnya, inilah gerakan nasionalis yang memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan Maroko. Mengerahkan masyarakat untuk mendukung pemberontakan dan Protes tersebut dapat mengan Maroko memperoleh kemerdekaannya (Jonathan, 2013).

Gerakan nasionalis Maroko dan mobilisasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembebasan lahan wilayah yang dibombardir perang. Masyarakat Maroko mendukung gerakan kemerdekaan negara melalui berbagai cara, termasuk gerakan nasionalis, mobilisasi masyarakat, perjuangan politis-politisi, perjuangan rakyat dan raja, perjuangan Aljazair, perjuangan Front Polisario, dan perjuangan pahlawan kemerdekaan. Semua ini merupakan bagian dari proses perjuangan kemerdekaan Maroko. Proses kemerdekaan Maroko dari kekuasaan Prancis dan Spanyol berlangsung dalam dua fase. Pada tahun 1956, Maroko mendapatkan kemerdekaan dari Prancis, dengan Sultan Mohammed V memegang kendali pemerintahan pada saat itu. Meskipun begitu, bagian selatan Maroko masih tetap di bawah kekuasaan Spanyol. Pembebasan bagian selatan Maroko dari Spanyol terjadi sekitar dua tahun setelahnya, ketika Spanyol mundur dari Sahara. Sebelum itu, sekitar dua tahun sebelum penarikan Spanyol, Aljazair dengan dukungan dari Uni Soviet membantu sekelompok pejuang Maroko untuk membentuk Polisario, yang mengklaim Sahara Barat sebagai negara merdeka. Setelah Spanyol meninggalkan Sahara, Polisario mendeklarasikan Sahara Barat sebagai negara merdeka, namun klaim ini tidak diakui oleh Raja Hassan II dan penduduk Maroko. Pada tanggal 16 Oktober 1975, International Court of Justice (ICJ) di Den Haag mengeluarkan keputusan yang tetap menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Keputusan ini mendorong Raja Hassan II untuk memerintahkan rakyat Maroko mengadakan Gerakan Hijau, sebuah demonstrasi massal yang dilakukan secara damai untuk membuktikan bahwa Sahara adalah bagian dari wilayah Maroko. Saat ini, Maroko dan Polisario masih terlibat dalam pembicaraan di Komisi IV PBB mengenai status Sahara (Rahman, M. A , 2015).

F. Rangkuman

Pada tahun 1912, Perancis mendapatkan kontrol atas Maroko melalui Perjanjian Fez, mengukuhkan posisinya sebagai kolonisator utama di wilayah tersebut. Penandatanganan perjanjian ini memicu perlawanan, termasuk peristiwa Bar Bar, di mana suku-suku Berber menghadapi penjajah Perancis. Pada tahun 1950, Dekrit Bar Bar dikeluarkan oleh pemerintah Perancis, mencoba untuk membagi Maroko menjadi beberapa wilayah otonom untuk mengendalikan perlawanan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Namun, upaya ini tidak berhasil meredakan ketegangan dan aspirasi kemerdekaan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan perundingan politik, Maroko memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956. Masyarakat Maroko mendukung gerakan kemerdekaan negara melalui berbagai cara, termasuk gerakan nasionalis, mobilisasi masyarakat, perjuangan politis-politisi, perjuangan rakyat dan raja, perjuangan Aljazair, perjuangan Front Polisario, dan perjuangan pahlawan kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut menandai akhir dari era kolonial Perancis di Maroko dan awal dari sebuah negara merdeka yang berdaulat.

G. Latihan

Kerjakan Latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana Maroko Sebagai Negara Jajahan Perancis?
2. Bagaimana Perjanjian Fez 1912 Terjadi?
3. Apa Itu Peristiwa Bar-bar?
4. Bagaimana Proses Kemerdekaan Maroko?

H. Rujukan

Abderrahim Ouardighi, *LaGrande Crise Franco-Marocaine, 1952-1956* (Rabat: L'Imprimerie nouvelle, 1976), h. 14.

Adwitama Adnan, (2022), *Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power)*, Yogyakarta 55281, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bernard Botiveau. (1993). *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes*. Paris : Karthala.

Bidwell, *Morocco under Colonial Rule*, h. 185.

- Fitria, R. I. V. C. (2018). *Faktor-faktor Penerimaan Positif Maroko Terhadap Pengungsi Pasca Pengesahan Konstitusi 2011*. (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018). Diakses dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10202/1/Ipik.pdf>
- Hanafi, Leila. (2020). *The Legal System of Morocco – An Overview*. Konrad-AdenauerStiftung e. V.
- Julien, Le Maroc, h. 454 dan Stephen Bernard, *The Franco-Moroccan conflict, 1943-1956* (New Haven: Yale University Press, 1968), h. 318-337.
- Jonathan Wyrzten, *Performing the Nation in Anti-Colonial Protest in Interwar Morocco*, *Journal of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism* 19 (4), 2013, h. 615-634.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat*. Retrieved from Daftar Duta Besar Indonesia untuk Maroko: <https://kemlu.go.id/rabat/id>.
- Lahbabi, *LeGouvernement Marocain a l'aube du XXe Siècle*, h. 23.
- Leveau, *Fellah Marocain*, h. 19-25.
- Maksum, M. (2016). *Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(2), 281-295.
- Moh. Nurhakim. (2004). *Sejarah dan Peradaban Islam*. Malang: Umm Pres. h.112.
- Nur Azhar, (2011), *Sejarah Islam Di Maroko*, Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
- Rahman, M. A. (2015). *Resistensi Politik: Pergerakan Nasionalis Maroko Vis Á Vis Kolonial Perancis*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32889/1/M%20ARIEF%20RAHMAN-FAH.pdf>
- Raphael Chijioke Njoke, *Culture and Costumes of Morocco* (USA:Greenwod Press: 2006) hal.31.

Sahabat Maroko. (2010). Sejarah Singkat Maroko.

<https://www.sahabatmaroko.com/read/2010/02/01/112/sejarah-singkat-maroko>

Diakses pada tanggal 23 maret 2024.

Syahaeni, A. (2013). ISLAM DI AFRIKA UTARA BAGIAN BARAT AL-MURABITHUN DAN AL-MUWAHHIDUN. Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 1(01).